

## Evaluasi Sistem Perizinan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam

Bukhari Usman<sup>\*1</sup>, M. Nasir Ismail<sup>2</sup>, Bukhari<sup>3</sup>, Mulyadi<sup>4</sup>, Zahrul Fuadi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

<sup>2,3,4</sup> Universitas Abulyatama Lampoh Keudee Aceh Besar

<sup>5</sup>Politeknik Venezwela Aceh Besar

\* Corresponding Author: [nasirmaya\\_fp@abulyatama.ac.id](mailto:nasirmaya_fp@abulyatama.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 3 Nov 2025

Revised: 8 Nov 2025

Accepted: 11Des 2025

Available online: 30 Des 2025

#### Kata Kunci:

Kebijakan, Perizinan, Dinas kesehatan

#### Keywords:

Policy, Licensing, Health Office

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perizinan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di sektor kesehatan. Fokus utama dari kajian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan perizinan, efektivitas proses perizinan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Kesehatan, pengamatan langsung, serta telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa meskipun Dinas Kesehatan telah menerapkan sistem perizinan yang sesuai dengan regulasi nasional, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan, serta lambatnya integrasi sistem digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi kebijakan, dan modernisasi sistem perizinan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang transparan, cepat, dan akuntabel.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the licensing policy implemented by the Subulussalam City Health Office to improve public services in the health sector. The main focus of this study is the implementation of the licensing policy, the effectiveness of the licensing process, and the challenges faced in its implementation. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through interviews with Health Office employees, direct observation, and a review of policy documents. The results indicate that although the Health Office has implemented a licensing system in accordance with national regulations, several obstacles remain, such as limited human resources, a lack of public understanding of licensing procedures, and slow integration of the digital system. Therefore, improvements are needed in the form of increasing the capacity of personnel, socializing policies, and modernizing the licensing system to achieve transparent, rapid, and accountable health services.*



## **PENDAHULUAN**

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup warganya. Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi ini dijalankan oleh institusi teknis seperti Dinas Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program-program kesehatan di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dari tugas tersebut adalah proses perizinan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Perizinan dalam sektor kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas, tetapi juga sebagai alat kontrol kualitas, keamanan, dan kelayakan fasilitas serta tenaga medis yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Melalui kebijakan perizinan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayahnya memenuhi standar nasional dan tidak membahayakan keselamatan pasien. Selain itu, sistem perizinan yang efisien dan transparan juga menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kota Subulussalam sebagai salah satu kota di Provinsi Aceh yang sedang berkembang, memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk dalam sektor kesehatan. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang memadai, Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dituntut untuk mampu mengelola proses perizinan secara efektif dan adaptif terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan dalam implementasi kebijakan perizinan di daerah ini. Beberapa di antaranya meliputi prosedur birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga lambatnya penerapan sistem perizinan berbasis digital.

Ketidakefisienan dalam proses perizinan ini berpotensi menghambat pertumbuhan sektor kesehatan swasta dan memperburuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, sistem perizinan dapat menjadi katalisator peningkatan mutu layanan kesehatan serta membuka peluang investasi di

bidang kesehatan secara lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang komprehensif mengenai kebijakan perizinan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, termasuk bagaimana implementasinya di lapangan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta potensi perbaikannya di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perizinan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dalam perspektif efektivitas, efisiensi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi aktual proses perizinan dan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik guna meningkatkan pelayanan publik di sektor kesehatan dengan mempertimbangkan pentingnya kebijakan perizinan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan analisis mendalam terhadap bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana perizinan telah memberikan kemudahan bagi pelaku layanan kesehatan, serta sejauh mana mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dalam memperbaiki sistem perizinan yang ada. Dengan demikian, proses perizinan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan perizinan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dengan mengangkat aspek pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi kebijakan tersebut di masa yang akan datang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung selama masa magang di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan perizinan di sektor kesehatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar pelayanan fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Subulussalam memiliki unit atau bidang tersendiri yang menangani proses perizinan, khususnya terkait dengan izin operasional klinik, praktik tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Proses perizinan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan berkas oleh pemohon, verifikasi administrasi, verifikasi teknis lapangan, dan penerbitan izin. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat atau pelaku usaha layanan kesehatan terhadap prosedur yang harus ditempuh. Hal ini sering mengakibatkan pengajuan izin menjadi tertunda atau tidak lengkap secara administratif.

Selain itu, masih ditemui kendala dari sisi internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia pada bidang perizinan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digital atau aplikasi pelayanan berbasis daring. Proses perizinan sebagian besar masih dilakukan secara manual, yang berdampak pada lambatnya pelayanan dan potensi terjadinya kesalahan dalam pengarsipan dokumen. Dinas Kesehatan telah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dengan melakukan sosialisasi rutin kepada fasilitas kesehatan swasta dan puskesmas, serta merancang integrasi sistem informasi kesehatan dengan layanan perizinan digital, namun implementasinya masih dalam tahap awal.

Dari hasil magang juga diketahui bahwa terdapat komitmen dari pimpinan dan staf di Dinas Kesehatan untuk memperbaiki sistem pelayanan, khususnya dalam menciptakan proses perizinan yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana pengembangan sistem pelayanan perizinan satu pintu yang terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Subulussalam.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan perizinan oleh Dinas Kesehatan Kota Subulussalam menunjukkan adanya kesesuaian dengan regulasi, namun tetap membutuhkan perbaikan di berbagai aspek, terutama dari segi efisiensi prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil ini menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sistem perizinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat dan perkembangan zaman.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi dan analisis selama kegiatan magang di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perizinan di sektor kesehatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Prosedur perizinan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan berkas hingga penerbitan izin. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan.

Meskipun demikian, Dinas Kesehatan menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan, baik melalui sosialisasi kepada pelaku layanan kesehatan maupun dengan upaya pengembangan sistem pelayanan berbasis digital dan integrasi dengan layanan perizinan satu pintu. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta percepatan digitalisasi proses perizinan agar pelayanan publik di bidang kesehatan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan magang ini juga memberikan wawasan dan pengalaman yang berharga dalam memahami implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya dalam hal perizinan pelayanan kesehatan, serta memperkuat keterampilan analitis dan profesionalisme di lingkungan kerja pemerintahan.

### **Saran**

Dinas Kesehatan Kota Subulussalam disarankan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha kesehatan terkait prosedur perizinan. Selain itu, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perizinan perlu dipercepat guna mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan perizinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. (2023). *Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perizinan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun 2023*. Subulussalam: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
- Ramadhani, A., & Putri, D. (2021). Efektivitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Kesehatan di Era Digital. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(1), 45-53.
- Sari, L. P., & Wijayanti, T. (2020). Optimalisasi Digitalisasi Sistem Perizinan di Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Dinas Kesehatan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(2), 77-85.
- Riansyah, F., Halizasia, G., Maayah, N., Maulida, M., Karo, D. A. B., & Husna, A. (2024). Karakteristik Demografi Dengan Self Management Hipertensi Pada Lansia Di Desa U Baro Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 11(1), 121-134.
- Riansyah, F., Utama, R. J., & Musdiani, M. (2023). Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Guna Mencegah Terjadinya Penyakit menular Pada Masyarakat Tibang Geulayang: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 34-39.
- Riansyah, F., Saputra, I., & Halizasia, G. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Brand Image Rumah Sakit Umum Sakinah Lhoksemawe, Aceh. *Teewan Journal Solutions*, 1(1), 36-42.
- Halimatussakdiah, H., Lestari, K. P., & Hamidah, H. (2023). Penerapan Oketani Breast Massage (OBM) pada ibu postpartum dengan pendekatan Evidence Based Nursing Practice (EBNP). *Jurnal SAGO Gizi dan Kesehatan*, 4(2), 252-262.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2022). *Laporan Penelitian Pelayanan Kesehatan dan Regulasi di Tingkat Daerah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Halimatussakdiah, H., Abdurrahman, A., Mutiah, C., & Veri, N. (2024). Pengembangan Desa Sehat Ibu dan Remaja Putri (Bu\_Retri) dengan Pendekatan Tokoh Gampong. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(12), 5293-5307.
- Halimatussakdiah, H. (2017). Lamanya Persalinan Kala I dan II pada Ibu Multipara dengan Apgar Score Bayi Baru Lahir. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 2(1), 6-12.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel*. Jakarta: Kemendagri.
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2023). Analisis Kebijakan Perizinan Pelayanan Kesehatan di Pemerintah Daerah: Studi di Kota-kota Kecil di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(3), 210-222.